

**NASKAH PUBLIKASI**

**PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BENDA JAMINAN  
SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI  
(Study Kasus di Perum Pegadaian Jepara)**



Oleh:

AHMAD SA'DI  
C 100 020 263

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.Hum)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama           AHMAD SA'DI

NIM            : C. 100. 020. 263

Alamat         : Desa Tegalsambi Tahunan Jepara Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 26 Juli, 2013



AHMAD SA'DI  
NIM: C. 100. 020. 263

## ABSTRAK

Ahmad Sa'di, NIM C 100 020 263 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sektor yang digunakan dalam rangka mencapai tujuannya untuk mensejahterakan warga negaranya adalah melalui lembaga Perkreditan yang berbentuk bank ataupun Non Perbankan. Perusahaan Perum Pegadaian (pawn shop) merupakan lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan uang pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Disamping itu, keberadaan Perum Pegadaian juga turut mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat. Maka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya status Hukum Lembaga Jaminan Pegadaian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 1990 menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang kemudian diperbarui lagi pada PP No. 103 Tahun 2000 menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk lebih mendalami dan memahami proses pengikatan benda jaminan dengan hak gadai di Perum Pegadaian Jepara, untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Perum Pegadaian Jepara bila terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur, untuk mengetahui pelaksanaan lelang benda jaminan Perum Pegadaian Jepara.

Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan Wanprestasi terjadi karena nasabah (debitur) tidak dapat memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan pihak pegadaian (kreditur), maka dalam hal ini kreditur mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh pegadaian (kreditur), maka cara yang digunakan oleh pegadaian untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah (debitur) yaitu dengan cara melelang barang jaminan yang dijamin oleh nasabah kepada pegadaian pada saat melakukan perjanjian. Pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Jepara telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak Pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian Jepara telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang.

***Kata Kunci : lelang, jaminan, wanprestasi***

## PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan dasar Negara Indonesia, di dalamnya tersurat tentang tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah Negara yang mengatakan bahwa sebagai sebuah Negara, Indonesia bertujuan membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur serta merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya untuk mensejahterakan warga negaranya adalah melalui lembaga Perkreditan yang berbentuk bank ataupun Non Perbankan. Perusahaan Perum Pegadaian (*pawn shop*) merupakan lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan uang pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Perum Pegadaian juga turut mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum (*public service*) dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan<sup>1</sup>. salah satu lembaga Perkreditan Non Perbankan adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian dibentuk merujuk pada ketentuan Gadai yang terdapat pada Pasal 1150 KUHPdata yang menyatakan sebagai berikut:

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan

---

<sup>1</sup> Rahmadi Usman , *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia* , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hal 55.

kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo.<sup>2</sup>

Maka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya status Hukum Lembaga Jaminan Pegadaian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 1990 menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang kemudian diperbaharui lagi pada PP No. 103 Tahun 2000 menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada Perum Pegadaian diawali dengan diadakannya perjanjian kredit antara Perum Pegadaian dengan pihak debitur, fasilitas kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian disertai jaminan berupa barang bergerak sesuai dengan Pasal 509 KUHPdata dengan ketentuan sebagai berikut:

“Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”

Fungsi dari jaminan tersebut adalah merupakan suatu jaminan atas berlangsungnya suatu hubungan utang-piutang. Apabila pihak nasabah/pemberi gadai wanprestasi yaitu tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kreditnya sampai tenggang waktu yang telah ditentukan maka pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya sendiri dengan jalan menjual dengan kekuasaan sendiri/ melelang barang jaminan tersebut.

Lelang tersebut harus memenuhi syarat pemberi gadai wanprestasi, adanya somasi/peringatan terlebih dahulu, penjualan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat dan kebiasaan setempat. Meskipun Perum Pegadaian

---

<sup>2</sup> KUHPdata Pasal 1150.

mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang gadai yang dikuasainya melalui pelelangan umum, tetapi dalam prakteknya hal tersebut mengalami hambatan baik segi yuridis administratif ataupun dalam masalah teknis.

Pelaksanaan lelang oleh Perum Pegadaian adalah lelang yang dilakukan oleh cabang sendiri dan Lelang merupakan bagian dari kegiatan kredit gadai usaha terakhir dalam rangka mengembalikan uang pinjaman dan sewa modal atas transaksi gadai. Pelaksanaan lelang ini tidak dapat dihindari mengingat tidak semua barang jaminan yang digadaikan ditebus oleh nasabah..

- a. Untuk lebih mendalami dan memahami proses pengikatan benda jaminan dengan hak gadai di Perum Pegadaian Jepara.
- b. Untuk Mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Perum Pegadaian Jepara bila terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang benda jaminan Perum Pegadaian Jepara.

## **B. Metode Penelitian.**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka itu.<sup>3</sup>

Dalam suatu sistem penelitian diperlukan suatu data yang dapat menunjang penyelesaian penelitian itu sendiri, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. DESKRIPSI TENTANG PEGADAIAN**

Pegadaian sebagai lembaga atau perusahaan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang – barang bergerak telah lama

---

<sup>3</sup> Roni Haritejo.SH, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 12

dikenal di Indonesia. Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir di saat VOC mulai berkuasa pada pertengahan abad kedelapan belas. Ketika VOC dibubarkan pada tahun 1800 dan Indonesia langsung dibawah penguasaan pemerintah Belanda, lembaga kredit bentukan VOC makin diperjelas, dengan keluarnya peraturan dari Gubernur Jendral Daendles yang merinci jenis dan macam barang yang dapat digadai yaitu : perhiasan (emas, perak, permata), kain, perabotan rumah, yang dapat disimpan dengan jangka waktu 3,5 bulan, yang sebagian dari peraturan ini masih dipakai hingga kini.

Kemudian saat Inggris mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda maka pegadaian hasil pembetukan VOC dibubarkan. Setelah itu dikeluarkan peraturan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian swasta, peraturan tersebut dikeluarkan oleh Jendral Raffles, yang mana Raffles memperkirakan akan mendapat keuntungan dengan mengeluarkan izin tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya dikeluarkan lisensi tersebut kurang menguntungkan pemerintah, karena para pemegang lisensi tersebut mempergunakan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan yang sangat besar dengan menjalankan praktek riba. Dengan kata lain praktek Licentie Stelsel menghidupkan praktek lintah darat, maka kemudian sistem tersebut diganti dengan Pachstelsel, yang menawarkan paling tinggi dan sanggup membayar sejumlah uang kepada pemerintah.

Ketika Belanda kembali berkuasa pada tahun 1816 Pachstelsel ini terus berkembang di Indonesia. Selama beberapa tahun usaha pegadaian ditangani pihak swasta, ternyata banyak terjadi penyelewengan oleh para pemegang hak seperti menaikkan suku bunga, menjual barang gadai tanpa lewat lelang atau tidak memberikan sisa uang tebusan kepada pemilik barang.

Ketika Belanda kembali berkuasa pada tahun 1816 Pachstelsel ini terus berkembang di Indonesia. Selama beberapa tahun usaha pegadaian ditangani pihak swasta, ternyata banyak terjadi penyelewengan oleh para



pemegang hak seperti menaikkan suku bunga, menjual barang gadai tanpa lewat lelang atau tidak memberikan sisa uang tebusan kepada pemilik barang.

Melihat perkembangan demikian, timbul pemikiran tentang perlunya pegadaian ditangani pemerintah sendiri, mengingat pegadaian swasta hampir tak ubahnya seperti lintah darat. Hasil penyelidikan yang dilakukan pada tahun 1900 oleh N.V.D. De Wolff, asisten residen di Purwokerto dan beberapa pejabat lainnya menyimpulkan bahwa pegadaian memang memberi keuntungan bagi masyarakat peminjam, dan pegadaian harus diusahakan sendiri oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian tersebut maka pemerintah dengan Ordonansi tanggal 12 Maret 1901 membuka Pegadaian Negara yang pertama di Indonesia, di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 dengan Stbl No. 131. Lembaga pegadaian di tahun – tahun berikutnya berkembang cepat ke berbagai daerah. Dalam pemantapan jalannya pegadaian yang telah diselenggarakan pemerintah itu, kemudian dikeluarkan berbagai ketetapan baru, seperti Struktur Organisasi Perusahaan Jawatan Pegadaian, peraturan pegadaian dan ketentuan tentang penilaian barang jaminan. Jumlah rumah gadai pada tahun 1941 mencapai 492 buah. Namun ketika Jepang memulai kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1942, usaha pegadaian mengalami masa suram. Pada periode penjajahan Jepang ini, pegadaian memang masih ditangani oleh pemerintah dengan status Jawatan dibawah pimpinan dan pengawasan kantor keuangan. Akan tetapi pada periode ini, lelang yang merupakan usaha terakhir untuk pelunasan gadai dihapuskan dan barang – barang berharga seperti emas, intan, berlian di pegadaian di ambil oleh pemerintah Jepang.

Dengan semakin berkembangnya pegadaian di Indonesia baik dari segi jumlah modal yang dikelolanya serta juga luas daerah operasinya maka penyelenggaraannya diatur dalam Stbl. No Tahun 1928.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Poerwoko, *Sejarah dan Struktur Organisasi Perjanjian Pegadaian*, (Jakarta; Kantor Jawatan Pegadaian, 1978), cet.I, hal.8

Sampai dengan tahun 1961 pegadaian status hukumnya berbentuk Jawatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Negara dalam lingkungan Kementerian Keuangan, kemudian pada tahun 1965 Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan kedalam urusan Bank Sentral.

Dalam pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/MK.6/1/1971, jawatan pegadaian mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam :

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai ;
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman tidak wajar, ijon, pegadaian dan praktek riba lainnya ;
3. Usaha – usaha lain yang bermanfaat terutama bagi pemerintahan dan masyarakat ;
4. Membina pola perkreditan supaya benar – benar terarah dan bermanfaat

Setelah mengalami pasang surut dari mulai periode penjajahan Belanda sampai dengan masa kemerdekaan dengan melalui berbagai kebijakan pemerintah Kemudian pegadaian kembali mengalami perubahan status hukum dari perusahaan jawatan berubah menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, dan masih menetapkan bahwa pegadaian selalu salah satu Badan Usaha milik Negara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990, Perusahaan Umum Pegadaian mempunyai tujuan :

5. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman.
6. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan lain – lain

## **B. PROSES PENGIKATAN BARANG JAMINAN DENGAN HAK GADAI DI PERUM PEGADAIAN**

Perum Pegadaian pada awalnya merupakan lembaga ekonomi yang hanya menyalurkan utang piutang dengan gadai saja seperti yang diatur di dalam Pasal 1150 KUHPerdara yang dalam praktek mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dimana gadai tersebut menganut asas *inbezitzeteling*, yaitu bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang – barang itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai/kreditur.

Kemudian Perum Pegadaian khususnya Perum Pegadaian Jepara sebagai lembaga keuangan yang tidak mau ketinggalan jaman dan perkembangan masyarakat, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1152 KUHPerdara. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda – benda bergerak berwujud karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda – benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari – hari, misalnya Bus, Truk, atau mobil Taksi bagi perusahaan angkutan, alat – alat rumah makan, Sepeda bagi penarik rekening atau Lover susu dan lain sebagainya. Mereka itu di samping memerlukan kredit, masih membutuhkan tetap dapat memakai bendanya untuk alat bekerja.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistim hukum kita, dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini, objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan hutang adalah benda tidak

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan).

Dalam hal ini barang objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur. Akan tetapi terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan hutang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan, bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya, karena itulah dibutuhkan adanya satu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya, muncullah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur.

### **C. LANGKAH-LANGKAH YANG DITEMPUH OLEH PERUM PEGADAIAN JEPARA BILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR**

1. Wanprestasi terjadi karena nasabah (debitur) tidak dapat memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan pihak pegadaian (kreditur), maka dalam hal ini kreditur mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh pegadaian (kreditur), maka cara yang digunakan oleh pegadaian untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah (debitur) yaitu dengan cara melelang barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah kepada pegadaian pada saat melakukan perjanjian.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan barang gadai antara Perum Pegadaian dengan pihak debitur akan terjadi permasalahan dengan pihak kedua (debitur) apabila debitur terlambat dalam pembayaran angsuran. Namun pihak Perum Pegadaian mempunyai upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, upaya-upaya itu antara lain adalah :

a. Upaya-Upaya Persuasif

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah pihak pegadaian akan mencari sumber permasalahannya, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benarbenar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang.

b. Somasi (Peringatan)

Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manajer Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. Surat peringatan I, 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan angsuran.
- b. Surat Peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.
- c. Surat Peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II.<sup>7</sup>

c. Proses Pelaksanaan Penarikan / Penyitaan barang

d. Proses Pelaksanaan Penarikan / Penyitaan barang

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang menjadi hak perusahaan.

## KESIMPULAN

1. Perum Pegadaian Jepara adalah lembaga ekonomi yang bergerak dibidang penyaluran utang piutang. Perum Pegadaian Jepara yang awalnya hanya melayani pinjaman dalam bentuk gadai, sekarang berkembang kedalam bentuk jaminan fidusia.
2. Wanprestasi terjadi karena nasabah (debitur) tidak dapat memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan pihak pegadaian (kreditur), maka dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid*

hal ini kreditur mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh pegadaian (kreditur), maka cara yang digunakan oleh pegadaian untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah (debitur) yaitu dengan cara melelang barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah kepada pengadial pada saat melakukan perjanjian.

3. Pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Jepara telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak Pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian Jepara telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai pada jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut dilelang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Badruz zaman, *Hukum Gadai*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Bambang Prihasdoyo dan Agus Trimarwanto, *Pelajaran Ekonomi SMP Kelas 3*, Jakarta, Grasindo, 2005.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: PT. Mediatama Sarana, 1991.
- Gatot Supramono, *Prebankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- HB, Soetopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Pusat penelitian UNS, Surakarta, 1994.
- J. Satria, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1977.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Mariam Darus Barulzaman, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatannya Dalam Praktek di Medan*. Alumni Bandung, 1991.
- Pegadaian, Jakarta. *Kantor Pusat Perum Pegadaian*, 1996.
- Poerwoko, *Sejarah dan Struktur Organisasi Perjanjian Pegadaian*, (Jakarta; Kantor Jawatan Pegadaian, 1978), cet.I.
- Rahmadi Usman , *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia* , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Roni Haritejo.SH, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- S. Nasution, 2001, *Metode Research ( Penelitian Ilmiah )*, Jakarta: PT. Buana Aksara.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermassa, 1987.

Soerjono dan Abdul Rahmat, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta , Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : VI Press, 1986.

Sri Soedewi Majchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok  
Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Sulistia ML, et al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, Penerbit IKIP  
Semarang Press, 1991.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003.

Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Benda*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1984.